

# PEMBERDAYAAN KOMUNITAS SEKTOR INFORMAL PEDAGANG KAKI LIMA (PKL), SUATU ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Trisni Utami

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2009

## Abstract

*The existence of vendors (PKL) informal sector community is an urban economic reality and needs adequate consideration in the development process. In Surakarta city, vendors are organized, by relocating the Banjarsari street sellers into the market traders in "Pasar Klithikan Notoharjo". Therefore, there should be an attempt/ a strategy to enable the street sellers community adapting well in facing such change/movement so that such community will be empowered, escaped from the marginalization and poverty. The research method employed in this research was action research. The aspirations and obstacles the street sellers faces, particularly after the movement into the market trader, was collected through in-depth interview and Focused Group Discussion (FGD). Then, the information collected was used as the material for developing a model of street seller empowerment, particularly in adapting the street seller (informal sector) into market trader community (formal sector).*

**Keywords :** vendors, empowering, poverty

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan komunitas sektor informal pedagang kaki lima (PKL) merupakan realita perekonomian kota dan perlu mendapat perhatian secara memadai dalam proses pembangunan. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan PKL sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota, misalnya menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemrawutan lalu-lintas, potensi konflik yang relatif besar dan sebagainya. Namun demikian, PKL mempunyai kontribusi yang berarti bagi perekonomian masyarakat, terutama pada saat semakin sempitnya lapangan kerja. PKL perlu ditangani/ditata secara terpadu melibatkan semua pihak yang berkepentingan, manusiawi, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas PKL.

Di Kota Surakarta beberapa waktu yang lalu telah melakukan penataan PKL, salah satunya dengan cara merelokasi PKL Banjarsari menjadi pedagang pasar di Pasar Klithikan Notoharjo. Hal ini merupakan salah satu penangan PKL yang sekaligus bertujuan meningkatkan taraf hidup PKL. Bagi Komunitas PKL, hal ini tidak hanya menyangkut perpindahan lokasi usaha, namun terjadi perubahan yang fundamental, yakni perpindahan dari komunitas sektor informal sebagai PKL menjadi komunitas yang bekerja/berusaha di sektor formal sebagai pedagang pasar. Perpindahan dari PKL (komunitas sektor informal) menjadi pedagang pasar (komunitas sektor formal) sudah barang tentu memerlukan adaptasi/penyesuaian secara baik agar lebih berhasil setelah menjadi pedagang pasar. Kalau tidak dapat melakukan adaptasi secara baik, dikawatir-

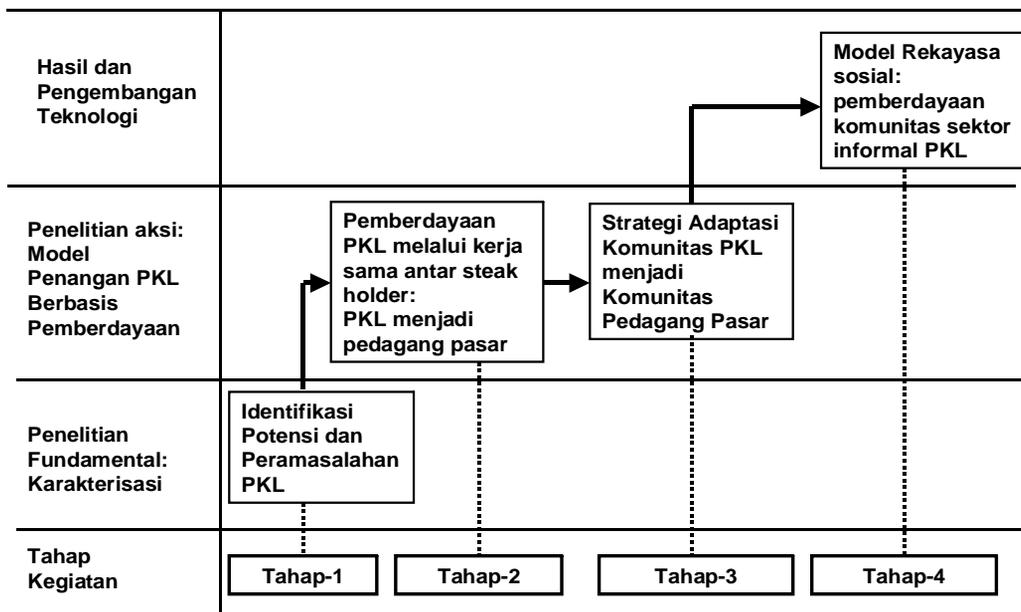
kan terjadi kegagalan dan menyebabkan komunitas tersebut menjadi lebih marginal dan menjadi miskin.

Sebagaimana dipahami bahwa komunitas yang berusaha/bekerja pada sektor informal, termasuk PKL, pada umumnya merupakan komunitas marginal yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan usaha, antara lain: (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. Secara umum komunitas informal perlu diberdayakan agar meningkat taraf hidupnya.

Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada PKL sudah barang tentu dapat menjadi kendala bagi PKL dalam beradaptasi terhadap suatu perubahan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kaji tindak (*action riset*) untuk mendapatkan model/strategi

adaptasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar sekaligus bertujuan meningkatkan taraf hidup komunitas tersebut.

Berdasar Roadmap penelitian “Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal PKL” (Gambar 1), terlihat bahwa penelitian model/strategi adaptasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar merupakan penelitian lanjutan. Trisni-Utami dkk. (2006) telah meneliti model pemberdayaan PKL melalui kerjasama antar stake holder. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa relokasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar merupakan penataan PKL yang sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup komunitas tersebut. Sebagai kelanjutan upaya pemberdayaan komunitas PKL, penelitian ini akan mengevaluasi dan berupaya mendapatkan model/strategi adaptasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar agar komunitas tersebut menjadil lebih berdaya.



Gambar 1. Roadmap penelitian pemberdayaan komunitas sektor informal PKL

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasar uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menyusun model pemberdayaan komunitas PKL, khususnya strategi adaptasi komunitas informal PKL menjadi pedagang pasar (dari sektor informal ke sektor formal). Penelitian ini mengkaji:

- (a) Mengkaji penataan PKL di Kota Surakarta selama ini, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun permasalahan yang terjadi, sebagai bahan pijakan penyusunan model dan strategi yang lebih baik dalam melakukan penataan PKL.

- (b) Mengkaji secara bersama-sama upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PKL pasca relokasi di pasar Notoharjo Semanggi Kota Surakarta.
- (c) Menyusun Model Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Sektor Informal PKL khususnya Pasca Relokasi.

### C. Hasil/ Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam ikut serta menanggulangi kemiskinan, khususnya melalui pemberdayaan komunitas informal PKL.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Participation Action Reserch.

### A. Pendekatan Partisipatif

Kepentingan pendekatan ini adalah emansipasi/pelibatan masyarakat. Metode-metode yang menggunakan pendekatan yang partisipatif ini (misalnya *Participatory Rural Appraisal* dan *Participatory Action Research*) bukanlah pendekatan yang *ahistoris* (terlepas dari pendekatan-pendekatan sebelumnya). Pendekatan ini banyak menggunakan metode-metode yang sudah ada, yakni menggunakan cara-cara yang digunakan dalam teori-teori antropologi, komunikasi, sosiologi, dll.

### B. Partisipasi

Secara *harfiah*, partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan" Kata 'keterlibatan' dalam definisi partisipasi sendiri ditafsirkan secara beragam oleh banyak kalangan.

### C. Partisipasi Action Research

Cukup banyak ragam dan pendekatan dalam proses perencanaan dan riset yang partisipatif, Di Indonesia program perencanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah German Barat dan GTZ, metode perencanaannya disebut dengan ZOPP (*Ziel Orientierte Projekt Planung*) atau OOPP (*Objective Oriented Project Planning*- dalam bahasa Inggris). Semua proyek-proyek Pemerintah German Barat yang ditangani oleh GTZ diharuskan menggunakan metode ZOPP sebagai pendekatan untuk melakukan perencanaannya. Termasuk juga di Indonesia, di mana proyek-proyek yang dikembangkan oleh GTZ bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia juga menggunakan pendekatan/metode ZOPP sebagai pendekatan dalam perencanaannya

### D. Teknik Pelaksanaan

#### a) Survei Pendahuluan

Kegiatan ini merupakan konsolidasi awal antara peneliti dengan komunitas yang diteliti, khususnya untuk menemukan kesefahaman bersama, data-data sekunder pendukung dan berbagai aspek teknis dan komunikasi dengan komunitas yang diteliti.

#### b) Persiapan Teknis

Kegiatan ini meliputi persiapan aspek administratif yakni perijinan, undangan, kepersertaan, waktu, tempat dan sarana pendukung lainnya. Adapun tahapan selanjutnya adalah persiapan aspek sarana dan prasarana meliputi alat untuk dokumentasi, alat peraga, ATK, dan lain sebagainya.

#### c) Pembentukan Tim dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti utama di bantu 3 orang Asisten Peneliti disusun berdasarkan teknik yang dipilih dalam pendekatan PAR.

#### d) Pelaksanaan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemerintah Kota tentang Relokasi PKL di Surakarta

Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta pada awalnya menjadi tanggung jawab Dinas Pengelola Pasar (DPP) Kota Surakarta, yang pada akhirnya pada tahun 2001 dengan dibentuknya Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Kota Surakarta, maka dilimpahkan kepada Kantor PPKL.

1. Kantor Pedagang Kaki Lima (PPKL) Kota Surakarta Ujung Tombak Penataan dan Pembinaan PKL

Dasar pendirian Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PPKL) (Langgar Perda, 4 PKL dihukum Percobaan" [Berita] Solopos, 14 Juni 2007) adalah Perda No.6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Perangkat Pemerintahan Kota Surakarta dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Surakarta No.41 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan perda No.8 Tahun 1995.

2. Penataan dan Pembinaan PKL di Surakarta Pasca Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Baru : Melebur dengan Dinas Pengelola Pasar.

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permen Dagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, menjadikan Perda No.6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Perangkat Pemerintahan Kota Surakarta sebagai dasar pendirian Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PPKL) Surakarta harus diperbaharui.

### B. Profil Pasar Notoharjo

Pasar Klithikan Notoharjo di bangun menghabiskan dana sebesar 5,5 Milyar yang diambil dari APBD tahun 2006. Lokasi Pasar Klithikan Notoharjo menempati tanah seluas 11.950 m<sup>2</sup> dengan penggunaan lahan yaitu untuk bangunan kios seluas 6.108 m<sup>2</sup>, sarana dan prasarana seluas 5.800 m<sup>2</sup> dan sisa lahan yang ada yaitu 42 m<sup>2</sup>. Di lokasi Pasar Klithikan Notoharjo sebelumnya telah berdiri bangunan Pasar Hasil Bumi (1997) yang dibangun oleh Pemda Surakarta menggunakan dana dari APBD Provinsi yang kemudian mangkrak ("Persiapan Kirab sudah Mencapai 95%. Malam ini, *mido-dareni* di Klithikan Notoharjo" [Berita], *Solopos*, 22 Juli 2006), sehingga pada tanggal 30 Maret 2006, Pasar Hasil Bumi yang mangkrak ini mulai dirobokkan dan mulai dibangun Pasar Klithikan Notoharjo.

1. Kantor Pengelola Pasar

Pasar Klithikan Notoharjo merupakan salah satu pasar yang dikelola di bawah Dinas Pengelola Pasar Surakarta (DPP), yaitu sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

2. Pelaku Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta

Terdapat tiga pelaku pasar sebagai pelaku yang menghidupkan aktivitas ekonomi di Pasar Klithikan Notoharjo, ketiga pelaku pasar tersebut meliputi Pedagang Kios, Pedagang Bronjong dan Pedagang Shelter.

3. Status Kepemilikan Kios

Formalisasi keberadaan pedagang eks pedagang kaki lima Kawasan Monumen '45 Banjarsari oleh pemerintah ditandai dengan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal; Surat Hak Pe-

nempatan (SHP), Surat Izin Perusahaan (SIP) oleh Dinas Pengelola Pasar kepada pedagang. Penggunaan APBD dalam pembangunan pasar menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan milik pemerintah, sehingga transaksi jual beli kios merupakan tindakan illegal.

#### 4. Retribusi

Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo dalam melakukan aktivitas ekonomi setiap bulannya dikenai retribusi dari pengelola pasar (DPP) dan PAM Swakarsa. Dasar hukum penarikan retribusi pengelola pasar adalah: (1) Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Pasar; (2) Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar; (3) Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Perda Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan; (4) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Pengganti Biaya Pembayaran Listrik Dalam Kompleks Pasar di Kota Surakarta.

#### 5. Paguyuban Pedagang

Terbentuknya HPKPN merupakan konsekuensi formalisasi terhadap keberadaan paguyuban-paguyuban yang eksis di Komunitas Pedagang Kaki Lima di Monumen '45 Banjarsari. Sepuluh Paguyuban yang sebelumnya eksis dengan sendirinya bubar secara alamiah. Pembubaran paguyuban-paguyuban tersebut tidak sertamerta memadamkan semangat untuk terus berjuang dari pedagang untuk memperjuangkan kejelasan nasib pedagang pasca relokasi.

#### 6. Koperasi Pedagang

Koperasi Monjari '45 merupakan koperasi binaan Pemkot Surakarta, dimana embrio pembentukannya telah digagas oleh Pemkot dan pedagang se-

menjak masih berada di Monumen'45 Banjarsari. Koperasi Monjari '45 merupakan salah satu pemenuhan janji Pemkot terhadap paket formalisasi pedagang kaki lima, yaitu penjaminan keberlangsungan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi.

### C. Adaptasi Pedagang

1. Formalisasi Sebagai Peluang Ekonomi  
 Formalisasi tidak sepenuhnya telah mempertahankan pedagang tetap berjualan di Pasar klithikan Notoharjo, tidak sedikit pedagang meninggalkan Pasar Klithikan Notoharjo karena tidak menyerap sepenuhnya tujuan dan cara-cara yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta untuk mengangkat martabat PKL dengan mendorong PKL untuk menjadi formal. Ada pedagang yang memang pergi dan menjual kiosnya, dan ada juga pedagang yang tetap mempertahankan kepemilikan kiosnya, tetapi mencari penghasilan di luar pasar.

#### 2. Adaptasi Perilaku Pedagang

Fungsi pasar sebagai sebuah tempat berjualan, merupakan pemknaan yang telah terkonstruksi oleh pedagang baik ketika masih berada di Kawasan Monumen '45 Banjarsari, ataupun setelah menempati Pasar Klithikan Notoharjo, Pasar dimaknai sebagai sebuah tempat untuk bertemunya antara penjual dan pembeli. Pedagang ketika menempati lokasi di Monumen '45 Banjarsari telah mencantumkan sebutan "Pasar Pedagang Kaki Lima" pada nota pembelian mereka.

### D. Penanggulangan Kemiskinan : Sebuah Pengalaman Action Research

1. Kebutuhan Pedagang Pasar Notoharjo  
 Penelitian ini di desain menggunakan metode *Partisipaory Action Research*. Kunci utama metode ini adalah upaya peneliti untuk membuka diri berhubungan dengan konunitas yang dite-

liti guna membangun emansipasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses *sharing of knowledge* antara peneliti dengan masyarakat di lokasi penelitian. Proses analisa dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisa tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disusun rencana tindakan bersama (oleh karena itu pendekatan ini disebut juga *riset aksi*). Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial, yaitu adanya adanya perumusan kebijakan di tingkatan Dinas Pengelola Pasar Pemkot Surakarta untuk komunitas Pedagang Pasar Kliethikan Notoharjo.

## 2. Komitmen Pengambilan Kebijakan dalam Pengembangan Pasar Tradisional

Visi Dinas Pengelola Pasar memperbaiki Citra Pasar, meliputi : Kebersihan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan sebagai salah satu tumpuan perekonomian Kota Surakarta. Visi- visi tersebut di realisasikan dengan menerapkan misi : membuka kesempatan bekerja dan berusaha warga masyarakat, menciptakan kemandirian dan ketertiban masyarakat, Peningkatan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pasar.

Sasaran : Lahan usaha bagi pedagang/pengusaha; Kondisi dan Situasi Pasar Bersih, Tertib, Aman dan Nyaman; Prasarana dan Sarana; Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

## E. Rekomendasi

Dari hasil kesimpulan diatas maka diperlukan upaya strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang di Pasar Kliethikan Notoharjo semanggi pasca relokasi antara lain :

1) Penguatan kapasitas bisnis atau pengembangan kewirausahaan di kalangan

pedagang baik melalui training atau *capacity building* untuk komunitas PKL

- 2) Perlu pemberdayaan ekonomi melalui akses bantuan permodalan.
- 3) Perlu dibangun komunikasi yang lebih dekat dengan para birokrat..
- 4) Perlu dibangun forum bersama antar stake holders dalam pengembangan pasar tradisional sehingga punya daya saing dengan pasar modern.
- 5) Perlu Pendampingan pada para pedagang Pasar Kliethikan Notoharjo di dalam pemecahan masalah terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di tempat yang baru.
- 6) Penataan dengan pendidikan lingkungan agar tidak terjadi kekumuhan dan perilaku yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kebersihan pasar.
- 7) Perlu Penguatan Komunitas Pasar Kliethikan Notoharjo dalam membangun daya saing pasar tradisional di Surakarta.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar penelitian ini dapat dikemukakan hal-hal berkaitan dengan adaptasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar. Komunitas sektor informal di perkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat marginal yang perlu diberdayakan agar lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga taraf-hidupnya meningkatkan dan lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kelompok ini pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan usaha, antara lain: (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan.

Perindahan lokasi usaha tersebut mengakibatkan perubahan pada mereka, dari komunitas PKL menjadi pedagang pasar sehingga mereka sekarang tergabung dalam komunitas/himpunan pedagang pasar tradisional Notoharjo. Perubahan ini juga mengharuskan mereka untuk mampu beradaptasi.

Proses pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pasar Notoharjo masih belum menyentuh pada pendekatan komunitas atau pedagang pasar itu sendiri. Kepentingan komunitas cenderung terabaikan dan belum diakomodir dalam pengembangan pasar. Pendekatan komunitas dan SDM turut menentukan keberhasilan daya saing pasar tradisional. Peran partisipasi Paguyuban belum mendapatkan perhatian secara memadai. Upaya pengembangan usaha dan pemberdayaan komunitas masih sangat kurang. Dilihat dari daya tahan, para pedagang pasar yang tadinya berasal dari komunitas PKL mempunyai potensi dan kemandirian usaha yang sangat baik, karena mereka mampu bertahan di masa pemindahan. Mereka sering dikenal sebagai "*Small Scale Enterpreneurs*".

Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (income). Oleh karena itu seringkali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi peningkatan pendapatan (income) saja tidak mampu

memecahkan permasalahan komunitas, karena pemberdayaan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks.

Bedasar hal-hal tersebut diatas, diperlukan upaya strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang di pasar Notoharjo Semanggi Pasca Relokasi antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas bisnis atau pengembangan kewirausahaan di kalangan pedagang baik melalui training atau capacity building untuk komunitas PKL
- 2) Perlu pemberdayaan ekonomi melalui akses bantuan permodalan.
- 3) Perlu dibangun komunikasi yang lebih dekat dengan para birokrat..
- 4) Perlu dibangun forum bersama antar stake holders dalam pengembangan pasar tradisional sehingga punya daya saing dengan pasar modern.
- 5) Perlu Pendampingan pada para Pedagang pasar Notoharjo dalam pemecahan masalah terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di tempat yang baru.
- 6) Penataan dengan Pendidikan Lingkungan agar tidak terjadi kekumuhan dan perilaku yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kebersihan pasar.
- 7) Perlu Penguatan Komunitas Pasar Notoharjo dalam membangun daya saing pasar tradisional di Surakar

## Daftar Pustaka

- Agung Wibowo. Skripsi : "BUNGA TROTOAR" KE PEDAGANG KIOS (Studi Pemaknaan Formalisasi Pedagang Pasca Huni Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen '45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta). Surakarta. Jurusan Sosiologi FISIP UNS. 2009
- Agus Dody Sugiartoto, *Perencanaan Pembangunan Parsitipatif Kota Surakarta*, Pendekatan Pembangunan Nguwongke-Uwong, Surakarta : IPGI, 2003
- Alif Basuki dan Yanu Endar, *Memusiumkan Kemiskinan, Saatnya Suara si Miskin Didengar Dan Menjadi Dasar Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, Pattiuro Surakarta, 2007
- Bartley. M, Unemployment and Ill Health: Understanding the Relationship. *Journal of Epidemiology and Community Health*.1994; 48 (4):333-37.
- Benneth, J.W. *Human Behaviour and Environment*, Plenum Press, London.1976
- Chriswardani Suryawati, 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK* Vol. 08/No.03/September/2005
- Cyert & Much. A. *Behavioral Theory*. Englewood Cliffs. 1963
- Etzioni, A. & Halevy, Eva Etzioni- (eds). *Social Changes: Sources, Patterns and Consequences*. Basic Books, New York. 1973
- Everett E. Hagen. *On The Theory of Social Change; How Economic Growth Begins*. Illinois. The Dorsey Press.1962
- Friedman, J. *Urban Poverty in America Latin, Some Theoretical Consideration*, Dag Hammarskjold Foundation. Upsala.1979
- Goodman. Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prenada Media. 2004
- Hardesty, *Ecological Anthropology*, New York, Chechester, Brisbane, Toronto, 1977.
- Hidayat. "Situasi Pengangguran, Setengah Pengangguran dan Kesempatan Kerja di Sektor Informal". Bandung: PPES UNPAD, 1983
- Indriyati Suparno, *Masih Dalam Posisi Pinggiran*, SPEKHAM Surakarta, 2005
- Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, California, Wadsworth Publishing Company, 1990, hal. 51
- Kemmis, S. and Mc.Taggart, R., *The Action Research Planner*. Dankin University, 1988.
- Koento, Wibisono. 1983. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Aygus Comte*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1983
- Lewis, Oscar. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Parsudi Suparlan*. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1996:7-11.
- M. Hari Mulyadi, dkk, *Runtuhnya Kekuasaan "Kraton Alit" (Studi Radikalisasi Sosial Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta)*, Surakarta : LPTP, 1999
- Mc. Clelland, *The Achieving Society*. Van Nostrandt Reinhald Co. New York. 1961.
- Muttia, S. 1991. *Penduduk dan Perubahan Lingkungan di Marunda Pulo*, Studi tentang Stress, Adaptasi, Disertasi Antropologi UI, Jakarta.1991

- Onny S. Prijono, *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS.
- Poloma, Margaret. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Praptono Djuned. 2004. *Tinjauan Teoritis Dan Empiris Kemiskinan Di Indonesia Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 8, Nomor 4 Desember 2004.
- Robert K. Marton, *Social Theory and Social Structure*, New Delhi, American Publishing, 1981, hal. 193.
- Rogers. *Communication of Inovation and Cross Cultural Approach*, New York.1972
- Scott,James. *Moral Ekonomi Petani*. Bandung: Bina Aksara, 1985.
- Sigit Wibowo dkk, *Bergerak Dari Komunitas*, Jari Indonesia, 2004.
- Smelser, Neil. *Toward Theory of Modernization dalam Amitai Etzioni dan Eva Etzioni (Ed), Social Change*. Basic Books. New York.1964:268–84.
- Soerjono Soekanto, *Kamus sosiologi*, Jakarta : Rajawali Press, 1985, h.10.
- Sulton Mawardi dan Sudarno Sumarto. 2003. *Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus : Pro-poor Budgeting)*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Sulton Mawardi dan Sudarno Sumarto. 2003. *Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus : Pro-poor Budgeting)*. Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU.
- Sunyoto Usman, *Di antara Harapan Dan Kenyataan*, CIPred, Yogyakarta,2004.
- Sunyoto Usman. *Jalan Terjal Perubahan Sosial*.CIPred Yogyakarta,2004.
- Sunyoto Usman. *Ruang Malioboro*.Yogyakarta:UGM, 2005.
- Suparlan P, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Jakarta.1980.
- Supriatna, Tjahya. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora Utama Press. Bandung.1997.
- Tara Suprobo, Ingan Ukur Tarigan, Daniel Weiss. 2007. *Laporan Teknis Sektor Informal Di Indonesia Dan Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementrian bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Kesehatan, GTZ
- Theodorson, GA, *Modern Dictionary of Sociology*, New York, Thomas Crowell, 1970, hal. 5
- Tim Kerja Stakeholders City Developmen Strategy (CDS) Kota Surakarta. 2003. *Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta (Sebuah Penelitian dalam Rangka kajian pendalaman Issu Pedagang Kaki Ilma (PKL) dengan Metode PRA (Participatory Rural Appraisal)*. Surakarta: Laporan Penellitian.
- Tim Kerja Stake-holders. *Penelitian Kharakteristik Pedagang kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta*. 2003.
- Trisni Utami ,*Transformasi Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian ke Sektor Informal Perkotaan*. Skripsi S1 Sosiologi Fisipol UGM.1986.
- Trisni Utami, *Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi, Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal (PKL) Melalui Kerjasama Antar Stake Holdeers Kota Surakarta UNS Surakarta- DIKTI*, 2006.
- Trisni Utami, *Pola Adaptasi Masyarakat Dalam Penerimaan Inovasi Pada Sistem Pertanian Peladangan, Studi Adaptasi Masyarakat Transmigran Rawajitu lampung Utara*, Thesis UI.1994.
- Trisni Utami. 2005. *Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Melalui Kemitraan Antar Stageholder (Studi Pada Komunitas Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta*. Surakarta: Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I.

- Trisni Utami. 2006. Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Melalui Kemitraan Antar Stakeholders (Studi Pada Komunitas Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Surakarta: Laporan Penelitian Hibah Tahun II
- Urban and Regional Development Institute (URDI). 2003. Studi Penanganan Ekonomi Informal di tingkat Lokal'. ('Study of Informal Economy at Regional Level'). Jakarta: Info URDI Volume 15
- Weinreb, L., Goldberg, R., Bassuk, E., Perloff, L., Determinants of Health and Services Use Patterns in Homeless and Low Income Housed Children. *Journal of Pediatrics*. 1998;102(3): 554-62.